

URUSAN KETENAGAKERJAAN

I. DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

a) Tujuan.

Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial.

b) Sasaran Program

Sasaran untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim syarat kerja, adalah :

- 1) Pemberdayaan hubungan industrial.
- 2) Fasilitas penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial.
- 3) Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan.

c) Pagu dan Realisasi

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dengan target sebesar Rp. 6.600.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.438.881.470,- (97,56%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat dpada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan pembangunan

Kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis antar pelaku produksi :

- Terbentuknya koperasi karyawan untuk 60 perusahaan
- Pemantauan dan pembinaan koperasi karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- Terlaksananya proses penyusunan Raperda Outshorsing.

- Terlaksananya proses pembahasan penanggulangan UMK 2011.
- Proses analisa KHL dan pelaksanaan Bimtek Survey KHL.
- Proses Bimtek dan penetapan UMK 2012.
- Tersusunnya Perda Outshosing.
- Pelaksanaan syarat kerja upah dan kesejahteraan.
- Sosialisasi ketetapan Gubernur tentang UMK tahun 2012.
- Sosialisasi Perda Outshorsing.

Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten, dan transparan :

- Mapping tingkat kerawanan perusahaan di 1.000 perusahaan di Jatim.

Kegiatan Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan :

- Terlaksananya penyusunan keanggotaan LKS Bipartit dan Terbentuknya Tripartit, dan dewan pengupahan Provinsi Jawa Timur 210 orang.
- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja LKS tripartit dan bipartit.

Kegiatan Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter :

- Terlaksananya Forum komunikasi dan konsultasi mediator se Jatim sebanyak 108 orang.
- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dalam menangani perselisihan HI di Jatim.
- Terlaksananya URC dan deteksi dini penanganan perselisihan HI perselisihan HI oleh mediator.

e) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan :

- Tingkat kesejahteraan pekerja belum memadai.

- Kondisi Hubungan Industrial belum sepenuhnya kondusif.
- Pembentukan LKS Tripartit belum menyeluruh di 38 Kab/Kota, sedangkan yang sudah terbentuk belum seluruhnya berperan efektif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
- Pembentukan LKS Bipartit masih sangat minim sehingga fungsinya dalam menjaga dan memecahkan kondisi Hubungan Industrial di perusahaan masih relatif rendah.
- Tingkat UMK belum sepenuhnya memenuhi angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak), meski secara bertahap UMK semakin mendekat angka KHL.

Upaya pemecahannya :

- Dilaksanakannya forum komunikasi dan konsultasi mediator se Jatim sebanyak 108 orang
- Dilaksanakannya URC dan deteksi dini penanganan perselisihan HI oleh mediator
- Dibentuknya koperasi karyawan untuk 60 perusahaan
- Penetapan UMK 2012
-

f) Penghargaan yang di terima baik Nasional maupun Provinsi.

No.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	Koperasi warga semen Gresik Juara II LKS Bipartit Award Tk. Nasional	Menakertrans, tgl. 17 Agustus 2011	
2.	Penghargaan Pengguna Tenaga Kerja Penyandang cacat Tahun 2011 PT. Graha Sarana Gresik.	Kemenakertrans, diserahkan pejabat Kemenakertrans dlm puncak Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA), 3 Desember 2011	Mempekerjakan 3 orang Tuna rungu sejak 2009.

2) Program Mobilitas Penduduk.

a) Tujuan.

Program ini bertujuan untuk mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan dan untuk menjembatani kepentingan daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal (MoU). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences), manfaat (sharing of benefits) dan saling memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menuntut skala ekonomi tertentu agar efisien untuk masing-masing daerah.

b) Sasaran Program

Sasaran untuk meningkatnya bidang ketransmigrasian, adalah :

- Peningkatan partisipasi, kerjasama antar pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan (penempatan) melalui KSAD dan forum KIE ;
- Tersedianya Data Informasi potensi lokasi transmigrasi (LPT/WPT);
- Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan dalam kawasan potensi SDM calon transmigrasi penempatan daerah asal (TPA) ;
- Pelayanan Prima Perpindahan dan Penempatan Transmigran ;
- Pembinaan, pengembangan sosial ekonomi yang mandiri bagi masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya.

c) Pagu dan Realisasi

Program Mobilitas Penduduk target sebesar Rp. 7.850.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.478.346.245,- (95,27%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan pembangunan

Kegiatan Kerja sama antar daerah Provinsi, Kab/Kota luar Jawa :

- Pendataan calon transmigran di 27 Kab/Kota pengirim.
- Pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan calon transmigran di 7 Kab/Kota
- Kunjungan penjajagan KSAD dan klarifikasi calon lokasi di 7 kab/Kota di luar Jawa.
- Peningkatan kualitas calon transmigran di 7 Kab/Kota. - Temu teknis bidang mobilitas penduduk yang menghasilkan naskah kesepakatan kerjasama.
- Tindak lanjut temu teknis bidang mobilitas penduduk 3 Bakorwil.
- Pemetaan dengan sasaran penelitian di 5 Kab/Kota di Jatim dan 3 Provinsi di luar Jawa.
- Pengadaan bibit kakao dan bibit kepala sawit.
- Pengadaan hand tractor dan hand spayer.
- Penyusunan data tentang peran serta Pemkot dan Pemkab terhadap program transmigrasi di 15 Kab/Kota dan 3 Provinsi.

Kegiatan Optimalisasi Penempatan Transmigrasi :

- Terlaksananya identifikasi di 6 lokasi.
- Terlaksananya pelatihan calon transmigran dengan jumlah peserta 80 orang.
- Kegiatan pembinaan KUB di 3 lokasi.

- Pengadaan bantuan peralatan di 10 lokasi beserta bimtek penggunaannya.
- Pelatihan calon transmigran jumlah peserta 320 orang.

e) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan :

Animo masyarakat untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi, sedangkan alokasi penempatan pada tahun 2011 masih relatif rendah.

Upaya pemecahannya :

Memberikan pengertian kepada calon transmigran agar lebih sabar menunggu, dan sewaktu-waktu ada Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari Pusat/Jakarta supaya siap berangkat sesuai dengan kesiapan daerah penempatan.

f) Penghargaan

No.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	Transmigrasi Award.	Kemenko Kesra, 28 Desember 2011	Diserahkan Menko Kesra Agung Laksono didampingi Menakertrans Muhaimin Iskandar

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

a) Tujuan

Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja serta untuk mengisi lapangan kerja didalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT-PK yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional.

b) Sasaran

Untuk mencapai terwujudnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif, adalah :

- Bimbingan pemanduan wirausaha baru (WUB) bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan non terdidik ;
- Penerapan teknologi padat karya dan perluasan kerja sistim padat karya produktif serta pola dampingan dana bergulir ;
- Pelaksanaan padat karya fisik dan produktif pada daerah miskin dan padat pengangguran

c) Pagu dan Realisasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 78.801.689.709,00 dengan realisasi Rp. 72.913.323.504,00 (92,53%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat dpada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif pada bidang peningkatan dan produktifitas Tenaga Kerja :

- Bimtek motivasi peningkatan kinerja petugas daerah/penyuluh LLS di Jawa Timur 156 orang;
- Bimtek Acheivment Motivasi Training (AMT) bagi LLS/BLK-LN 37 orang.
- Up grading intruktur UPT PK seJawa Timur 27 orang.
- Pendataan pemantauan lembaga pelaksanaan pelatihan di Jawa Timur 20 lokasi;
- Bimtek pengelola LLS di Jawa Timur, bimtek peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan di UPT PK, Bimtek peningkatan motivasi dan Team Building bagi intruktur 86 orang.

- Work Shop kinerja Instruktur UPK PK, Bimtek Asesor kompetensi kejuruan tata laksana rumah tangga (TLRT), penyusunan modul culture (budaya) negara tujuan, pembinaan kelembagaan terhadap LPK Swasta di Jawa Timur, Bimtek multimedia dan presentasi bagi instruktur UPT PK se Jawa Timur, Penyuluhan dan Akreditasi BLKLN.
- TOT Instruktur bengkel kerja bagi LAPAS 30 orang.
- Pendataan dan pemantauan lembaga pelaksana pelatihan di Jawa Timur 20 orang.
- Penyusunan modul culture (budaya) negara tujuan 15 orang, pemagangan rekrutment magang jepang 600 orang.
- Bimtek methodologi pelatihan bagi instruktur 38 orang.
- Pembinaan/Bimtek multimedia dan presentasi bagi instruktur LLS se Jawa Timur 45 orang.
- Penyuluhan dan akreditasi BLK-LN 18 lokasi.

Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan standart kompetensi kerja dan sistim sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

- Peningkatan dan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja (UKOM) 2.500 orang.
- Uji Kompetensi keterampilan pencari kerja/lulusan UPK PK se Jawa Timur 32 orang.
- Pelatihan dan sertifikasi calon assesor kompetensi 20 orang.
- Sosialisasi program pemagangan dalam negeri 48 orang.

4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

a) Tujuan.

Program ini bertujuan untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

b) Sasaran Program

Sasaran untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim syarat kerja, adalah :

- Pemberdayaan hubungan industrial.
- Fasilitas penyelesaian perselisian dan pembinaan hubungan industrial.
- Perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan

c) Pagu dan Realisasi

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan target sebesar Rp. 4.700.000.000,- dengan realisasi Rp.4.699.053.130,- (99,98%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat dpada LAMPIRAN (Matrik 11 Kolom).

d) Hasil Pelaksanaan pembangunan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan :

- Identifikasi permasalahan di perusahaan.
- Penyelesaian kasus ketenagakerjaan 160 orang, 521 perusahaan.

Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Sektor dengan Resiko Kecelakaan Kerja Tinggi :

- Terlaksananya rapat koordinasi dan identifikasi.

- Tenaga ahli Keselamatan kerja Lingkungan Kerja di perusahaan 60 orang, 200 perusahaan.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Ketenagakerjaan

- Terlaksananya koordinasi dengan perusahaan² di Jatim.
- Petugas K3 Kimia dan petugas pelayanan kesehatan di perusahaan 190 orang, 190 perusahaan.

Kegiatan Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, baik Sektor Pekerja Formal maupun Informal :

- Terlaksananya Identifikasi dan koordinasi dgn perusahaan².
- Peserta Jamsostek di perusahaan 180 orang, 180 perusahaan.

Kegiatan Peningkatan Pencegahan terhadap Eksploitasi dan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak dan Pekerjaan Perempuan :

- Tenaga kerja anak dan tenaga perempuan 30 orang, 138 perusahaan

e) Permasalahan dan Upaya pemecahannya

Permasalahan :

- Perlindungan pekerja termasuk tenaga kerja perempuan dan pekerja anak belum sepenuhnya terjamin.
- Kasus kecelakaan kerja belum sepenuhnya dapat dikendalikan ke arah zero accident.
- Belum semua perusahaan wajib Jamsostek menjadi peserta aktif Jamsostek (baik perusahaan dan tenaga kerja)

Upaya pemecahannya :

- Melakukan berbagai upaya untuk mendorong perlindungan dan pembinaan terhadap tenaga kerja wanita.
- Memberikan berbagai penghargaan di bidang K3 secara berkala serta Sistem Manajemen (SMK3).

5) Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

a) Tujuan

Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun sektor informal secara remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri.

b) Sasaran

Untuk mencapai terwujudnya penempatan tenaga kerja di Dalam dan ke Luar negeri, adalah :

- Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri ;
- Penempatan tenaga kerja Dalam Negeri (AKL dan AKAD) ;
- Penempatan tenaga kerja muda dan penyandang cacat (AKSUS).

c) Pagu dan Realisasi Program

Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja target sebesar Rp. 6.685.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.785.000.842,- (86,54%) secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (Matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan.

Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi, Identifikasi dan perekrutan TKM sebanyak 30 orang;
- Terlatihnya TKM Wanita Sarjana dan terdidik sebanyak 50 orang;
- Terlatihnya TKM masyarakat terdidik di pedesaan sebanyak 80 orang;
- Pendidikan Masyarakat Produktif dalam rangka penciptaan lapangan kerja :
- Sosialisasi, identifikasi, seleksi dan perekrutan peserta sebanyak 90 orang.

- Terlatihnya kader TPK sebanyak 30 orang.
- Terlatihnya pemula usaha teknologi pemula sederhana sebanyak 30 orang.
- Terlatihnya wirausaha kecil aneka terapan sebanyak 90 orang.

Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja ke luar negeri :

- Pelaksanaan bimbingan dan PAP bagi TKI ke luar negeri.
- Perlindungan dan pemulangan TKI bermasalah sebanyak 104.755 orang

Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja dalam negeri :

- Pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat sebanyak 100 orang;
- Pelatihan mantan TKI bermasalah sebanyak 1.040 orang;
- Monev penempatan tenaga kerja melalui AKAD dan monev kantor cabang PPTKIS.

Pengembangan dan peningkatan bimbingan Jabatan, Bursa Kerja Khusus, dan Bursa kerja Pemerintah serta swasta (BKP/BKS) melalui PLKT, Radio Job FM :

- Terlaksananya jejaring Bursa Kerja, penyajian informasi pasar kerja yang aktual, penyuluhan ke 10.000 lowongan kerja, dan 1.600 penempatan tenaga kerja melalui BKO, penyuluhan dan bimbingan jabatan, penyusunan IPK dan pelaksanaan Job Market fair.

Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel :

- Terlaksananya sosialisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Bidang ketenagakerjaan di 125 perusahaan.

e) Permasalahan dan upaya pemecahannya.

Permasalahan :

- Lowongan kerja yang terdaftar baik dari dalam maupun Luar Negeri tidak dapat diisi sepenuhnya dikarenakan kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan jabatan yang diminta, terutama dari segi keterampilan kerja.
- Rendahnya semangat angkatan kerja untuk berwirausaha dalam kegiatan ekonomi produktif dan masih tingginya kecenderungan orientasi menjadi pegawai negeri. Penyebabnya adalah kurangnya motivasi dan ketersediaan modal usaha serta belum terkondisinya mekanisme pemasaran.

Upaya pemecahan permasalahan :

- Diadakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja baik di Dalam maupun Luar Negeri di BLK, Pemerintah dan BLK Swasta (BLKLN).
- Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh institusi formal maupun informal secara konstuitas lewat media cetak maupun elektronika, disamping itu perlu dimasukkan dalam dunia pendidikan sebagai muatan lokal untuk materi wirausaha, sehingga para lulusan sekolah tidak selalu menggantungkan pekerjaan sebagai PNS, tetapi sebaliknya harus dapat menciptakan lapangan kerja.